

**PENGARUH INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN POPULASI PENDUDUK  
TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT,  
TAHUN 2005 – 2017**

**Lillyani Margaretha Orisu**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua, Manokwari

Email : lior\_noel@yahoo.com

***Abstract:** This reserach focus to analysis government expenditure in West Papua Province. Using secondary data from BPS. Estimation method that used in this research is ordinary least square multiple regression. Variable independent in this research are inflation, economic growth and population. Results shows that only economic growth significantly affecting government expenditure in West Papua Province using alpha 5 percent. Meanwhile inflation variable and population variale not affecting government expenditure in West Papua province.*

***Keywords:** government expenditure, economic growth, regression*

## **PENDAHULUAN**

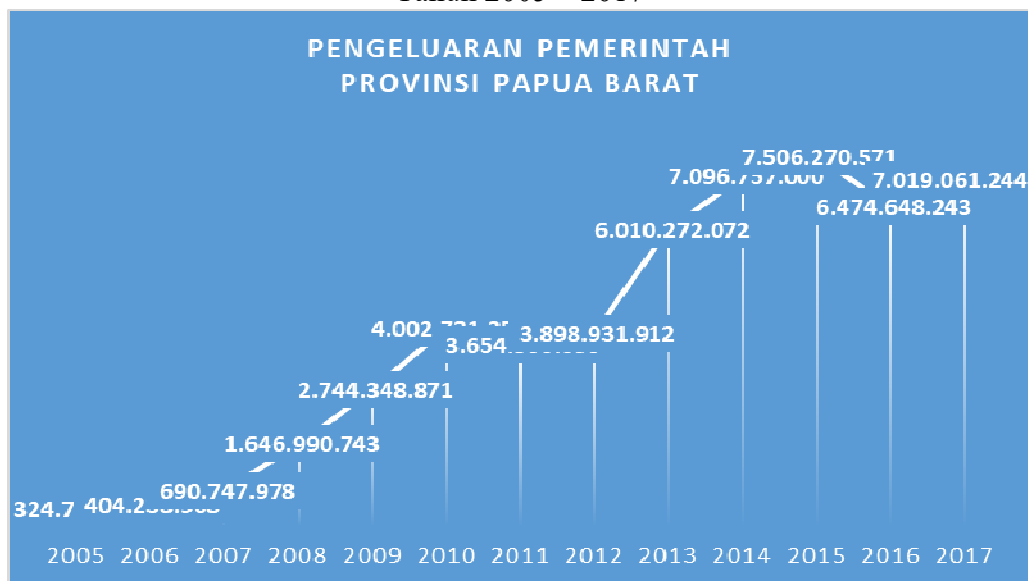
Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam pembahasan perekonomian suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan. Tujuan pembangunan ekonomi, pemerintah sebagai fasilitator pembangunan menempuh berbagai kebijakan ekonomi yang sejauh mungkin mampu menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif untuk semua pelaku ekonomi, anggaran belanja merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal mempengaruhi mekanisme perekonomian melalui bekerjanya anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi (Musgrave, dalam Wiralaga, 2005).

Perubahan paradigma pembangunan yang semula mengutamakan pencapaian pertumbuhan ekonomi bergeser menjadi pemerataan ekonomi dengan prinsip keadilan dalam era otonomi. Terbitnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan langkah strategis dalam menjawab berbagai

permasalahan yang muncul di daerah antara lain meliputi permasalahan kemiskinan, disparitas pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Keterbukaan ini menciptakan peluang daerah untuk memperkuat perekonomian berbasis *lokal wisdom* guna menyongsong era digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Kemampuan pemerintah daerah menyusun arah dan kebijakan di bidang keuangan, peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta penyediaan berbagai fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat merupakan ukuran capaian keberhasilan.

Pemerintah daerah berperan dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah sebagai sumber penerimaan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2007). Provinsi Papua Barat dengan 11 kabupaten/kota tentu memiliki berbagai keunikan dan berbagai permasalahan yang harus diatasi. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat menunjukkan perannya dalam perekonomian guna mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Pengeluaran pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2005-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1  
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Papua Barat,  
Tahun 2005 – 2017



Grafik 1 di atas menunjukkan pengeluaran pemerintah Provinsi Papua Barat berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pengeluaran pemerintah terbesar yakni belanja modal, pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal termasuk diantaranya adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan maupun jaringan

fisik lainnya. Bertujuan untuk membentuk aset tetap atau investasi yang diharapkan memberikan manfaat pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 yakni mencapai 138,4% sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 13,6%, sebagai wilayah yang gencar dalam pembangunan maka pengeluaran pemerintah sudah sepatutnya mengedepankan prioritas sehingga penyerapannya berjalan optimal, sinkronisasi kerjasama dan komunikasi yang baik antar satuan kerja perangkat daerah serta ego-sektoral yang terorganisir dan terintegrasi dengan baik akan berimplikasi pada capaian kerja pembangunan daerah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, bila telah dilakukan suatu penetapan kebijakan yang bersifat investasi pembangunan maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1994).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah 1) berapa besar pengaruh inflasi terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat; 2) berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat, dan; 3) berapa besar pengaruh populasi penduduk terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen dalam penelitian ini, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk terhadap pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko, 2002).

Boediono (1999), mengungkapkan bahwa dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut: 1) pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; 2) pengeluaran pemerintah untuk gaji dan pegawai, dan: pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesoebroto, 1993): 1) Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentasi investasi pemerintah

terhadap total investasi besar, pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada tahapan ekonomi yang lebih lanjut, pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial; 2) Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dan; 3) Teori Peacock & Wiseman, Teori mereka sering disebut sebagai *The Displacement Effect*, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori ini didasarkan pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

### **Inflasi**

Pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun pada kenyataannya, inflasi tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lainnya seperti tata niaga dan kelancaran dalam lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijakan pemerintah.

Sukirno (2000), membedakan inflasi berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya menjadi dua, yaitu: 1) Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) adalah inflasi yang terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang terwujud dalam pasaran. Masalah kekurangan barang akan berlaku dan mendorong kepada kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. 2) Inflasi desakan biaya (*demand push cost*) merupakan masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Penambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya.

Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat (*monetary inflation*), misalnya dengan cara mencetak uang baru, pengeluaran kembali uang lama sehingga jumlah uang beredar semakin banyak. Sebagai suatu fenomena ekonomi, inflasi sering terjadi karena sensitif terhadap perubahan musim, arus distribusi, rumor, stabilitas politik dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inflasi pada umumnya berlangsung

dalam jangka waktu yang cukup lama sedangkan deflasi umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek dan pengaruhnya tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan inflasi.

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *time series* dengan periode tahun 2005-2017, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Provinsi Papua Barat.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model time series, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \beta_i + \sum \beta_k X_k + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

dimana Y adalah variabel pengeluaran pemerintah merupakan variabel dependen, X adalah determinan pengeluaran pemerintah merupakan variabel independen,  $\varepsilon$  adalah *error term*. Variabel deteriman pengeluaran pemerintah yakni,  $X_k$  adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk. Persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + e \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

- $Y$  = Pengeluaran pemerintah di Papua Barat (rupiah)
- $X_1$  = Inflasi di Papua Barat (persen)
- $X_2$  = Pertumbuhan ekonomi di Papua Barat (rupiah)
- $X_3$  = Populasi penduduk di Papua Barat (jiwa)
- $a_0$  = Intercept
- $a_1, a_2, a_3$  = Koefisien regresi
- $e$  = *Error term*

Sebelum dilakukan pengujian asumsi klasik dan statistik maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dengna menggunakan uji *jarque-bera* untuk melihat apakah data berdistribusi normal ataukah tidak, jika J-B hitung < nilai  $\chi^2$  (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal. Setelah uji normalitas data, selanjutnya regresi berganda dilakukan dan untuk melihat apakah hasil estimasi baik untuk digunakan maka harus melalui uji asumsi klasik, yakni uji heteroskedastisitas, uji otokorelasi dan uji multikolinieritas, model dan hasil estimasi baik jika tidak mengandung penyakit dalam asumsi klasik. Untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel dan pengaruh serempak (bersama-sama) maka dugunakan uji *t* dan uji *F*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan *jarque-bera test* terlihat bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang berdistribusi normal, yakni variabel pengeluaran pemerintah nilai probabilitas J-B sebesar 56,5% dan variabel independen berturut-turut 58,8%; 48,6%, dan; 72,9%. Hasil estimasi regresi persamaan (2) adalah sebagai berikut.

Tabel 1  
Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

| Dependent Variable: Y |             |                   |             |          |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| Variable              | Coefficient | Std. Error        | t-Statistic | Prob.    |
| X1                    | -0.000273   | 0.000270          | -1.012599   | 0.3377   |
| X2                    | 118.7801    | 47.63767          | 2.493406    | 0.0342   |
| X3                    | 27.68921    | 12.22491          | 0.865068    | 0.4095   |
| C                     | -0.000527   | 0.000636          | -0.829413   | 0.4283   |
| R-squared             | 0.919599    | F-statistic       |             | 22.87521 |
| Adjusted R-squared    | 0.879398    | Prob(F-statistic) |             | 0.000196 |

*Sumber : Data diolah.*

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang dimasukkan dalam model, hanya variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) yang berpengaruh signifikan pada alpha 5%, artinya bila nilai pertumbuhan ekonomi meningkat (diproksi dengan perkembangan nilai produk domestik regional bruto) maka pengeluaran pemerintah yang juga akan meningkat. Sementara variabel inflasi ( $X_1$ ) dan populasi penduduk ( $X_3$ ) tidak signifikan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi Papua Barat.

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *White*, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Heteroskedasticity Test: White |          |                     |        |
|--------------------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic                    | 2.154980 | Prob. F(9,3)        | 0.2856 |
| Obs*R-squared                  | 11.25853 | Prob. Chi-Square(9) | 0.2584 |
| Scaled explained SS            | 2.467637 | Prob. Chi-Square(9) | 0.9817 |

*Sumber : Data diolah*

Hasil menunjukkan bahwa model yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas terlihat dari nilai probabilitas *chi-square* sebesar 25% lebih besar dari alpha 5%.

Hasil uji otokorelasi dengan menggunakan uji *Breusch-Pagan*, adalah sebagai berikut.

Tabel 3  
Hasil Uji Otokorelasi

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: |          |                     |        |
|---------------------------------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic                                 | 16.83079 | Prob. F(2,7)        | 0.1281 |
| Obs*R-squared                               | 27.53833 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0931 |

Sumber : Data diolah

Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat otokorelasi, terlihat dari nilai probabilitas *chi-square* sebesar 9,3% lebih besar dari alpha 5%.

Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan *auxiliary regression*, dengan membandingkan nilai *r-square* regresi utama dengan *r-square* regresi parsial. Nilai regresi utama sebesar 91,2 ;ebih besar dari nilai regresi parsial.

### Uji Statistik

Hasil uji *t* pada tabel 1, menunjukkan bahwa hanya satu variabel yang signifikan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah (Y) yakni variabel produk domestik regional bruto ( $X_2$ ) dengan nilai *t*-hitung 2,49 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 5%, sementara variabel inflasi ( $X_1$ ) dan variabel populasi penduduk ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah secara parsial. Hasil uji F, memperlihatkan bahwa secara bersama-sama (serentak) seluruh variabel berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Papua Barat.

### Analisis Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan anggaran yang cukup dan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan tolok ukur bagi penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Sugiardi dan Supadmi (2014), menganalisis tentang pengaruh PAD, DAU dan SILPA terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penelitian berpengaruh signifikan melalui pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Provinsi Papua Barat memiliki sumberdaya alam yang potensial, semakin berkembangnya perekonomian daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk berupaya mengoptimalkan dukungannya dalam pengalokasian anggaran daerah guna keselarasan program dan kebijakan yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dengan alpha 5% sementara variabel inflasi dan populasi penduduk tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Model yang digunakan baik karena mampu menjelaskan variasi pengeluaran pemerintah sebesar 91,9%.

Saran yang dapat dikemukakan yakni pemerintah daerah Provinsi Papua Barat hendaknya memperhatikan perekonomian daerah yang tercermin pada nilai produk domestik regional bruto, yang laju pertumbuhannya berbeda tiap kabupaten/kota. Mengidentifikasi daerah-daerah yang bertumbuh cepat dan memiliki peluang pengembangan hendaknya dipacu dengan anggaran dan kebijakan yang terfokus dan terarah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada naiknya pendapatan daerah yang jalur transmisinya akan berdampak pada pengeluaran pemerintah Provinsi Papua Barat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4, cetakan ke-2, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Boediono., 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 4*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N., 2003. *Basic Econometrics*, Third Edition, Mc.Graw – Hill International Edition.
- Halim A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi revisi. Salemba Empat. Jakarta
- Kuncoro M., 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga.
- Mangkoesebroto G. 1994. *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Sugiarthi Ni Putu D.E.R, Supadmi Ni Luh. 2014. PAD, DAU dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. E-jurnal akuntansi Universitas Udayana. Vol7. No.2.
- Sukirno S. 2000. *Makroekonomi Modern*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widarjono Agus, 2007, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi kedua, Penerbit Ekonisia, FE UII, Yogyakarta

Wiralaga, Harya Kuncara, 2005, “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah, Pertumbuhan dan Dispartitas Pendapatan Regional Kota dan Kabupaten di Indonesia, 1988-2003”, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.